

BAB II

KERANGKA TEORITIK

A. Kajian Pustaka

1. Sistem informasi manajemen

a. Pengertian sistem informasi manajemen

Pada umumnya sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang diciptakan untuk melaksanakan pengolahan data yang akan dimanfaatkan oleh suatu organisasi. Pemanfaatan data disini dapat berarti penunjangan pada tugas-tugas rutin, evaluasi terhadap prestasi organisasi, atau untuk pengambilan keputusan oleh organisasi tersebut. Kini apabila orang mendengar istilah sistem informasi manajemen, biasanya mereka juga membayangkan suatu sistem komputer.

Sesungguhnya, pengertian tentang sistem informasi manajemen di dalam organisasi telah ada sebelum perkakas komputer diciptakan. Inti dari pengertian sistem informasi manajemen konvensional tentu saja terkandung dalam pekerjaan-pekerjaan sistematis, seperti pencatatan agenda, kearsipan, komunikasi diantara manajer-manajer organisasi, penyajian informasi untuk pengambilan keputusan, dan sebagainya. “Namun dengan tersedianya teknologi

pengolahan data dengan komputer yang relatif murah, sekarang dan dimasa depan penggunaan komputer untuk menunjang sistem informasi manajemen tidak dapat dihindari lagi.”⁵ Wahyudi Kumorotomo dan Subandi Agus M. mendefinisikan:

Sistem Informasi Manajemen adalah suatu sistem yang diciptakan untuk melaksanakan pengelolaan data yang akan dimanfaatkan oleh suatu organisasi. Pemanfaatan disini dapat berarti penunjang terhadap tugas-tugas rutin, evaluasi terhadap prestasi organisasi, atau untuk pengambilan keputusan oleh organisasi tersebut.⁶

Dari pengertian diatas maka sistem informasi manajemen (SIM) dapat didefinisikan serangkaian sub sistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi secara rasional terpadu yang mampu mentransformasikan data, sehingga menjadi informasi lewat serangkaian cara untuk mengambil keputusan oleh para manajer sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Maka arah pengembangan sistem informasi manajemen adalah agar suatu organisasi mempunyai suatu sistem yang mengolah data menjadi informasi penting untuk membantu kerja manajer dalam mengambil keputusan. Sehingga sistem informasi manajemen dapat menunjang tugas-tugas pegawai serta semua unsur pokok yang terlibat dalam aktivitas organisasi. Seorang manajer sering kali kebanjiran informasi, namun tidak semua informasi dapat diterima.

⁵ Wahyudi Kumorotomo dan Subando Agus Margono "Sistem Informasi Manajemen" (Yogyakarta: UGM, 1996) hal. 8

⁶ Wahyudi Kumorotomo dan Subandi Agus Margono "Sistem Informasi Manajemen" (Yogyakarta: UGM, 1996) hal. 30

Yang diperlukan dalam organisasi adalah informasi yang baik dan relevan dengan kebutuhan organisasi. Sehingga manajer cenderung mengalami kesalahan saat menentukan kebijakan, karena kurang akuratnya informasi.

Selain itu juga dibutuhkan kemampuan untuk memilih informasi yang tepat, penerima juga harus memiliki kemampuan untuk melakukan seleksi. Kemampuan untuk melakukan seleksi penting supaya:

- 1) Hanya informasi relevan dengan misi, fungsi dan tugas yang diambilnya.
- 2) Biaya transmisi bisa ditekan serendah mungkin
- 3) Pengguna untuk memikul beban pemeliharaan yang sesungguhnya tidak diperlukan.

b. Fungsi sistem informasi manajemen

Pada dasarnya fungsi sistem informasi manajemen secara umum menurut Soejono Trimo adalah:

Suatu sistem jaringan informasi merupakan kumpulan dua atau lebih unit pusat dokumentasi secara bersama-sama berusaha untuk saling memperkuat atau melengkapi kekuatan koleksi sumber-sumber informasi yang mereka miliki serta melancarkan dan mempertinggi mutu pelayanan informasi yang mereka berikan kepada para pemakai layanan informasi.⁷

⁷ Soejono Trimo, *Pengantar Ilmu Dokumentasi* (Bandung: Remaja Karya, 1987) hal. 39

Dalam langkah lanjut, para pemakai jasa layanan informasi memanfaatkan sistem informasi untuk membantu tugas penentuan kebijakan organisasi bagi para manajer. Sistem informasi manajemen pada ujungnya berfungsi untuk mengolah informasi menjadi bahan pengambilan keputusan yang akurat. Meskipun bahan informasi bukan hanya diperoleh dari sistem ini, melainkan juga bisa diperoleh dari informasi luar serta pengalaman pribadi seorang manajer. Ruang lingkup dari fungsi pengambilan keputusan ini memiliki arah yang sangat luas dalam konteks manajemen organisasi. Pengambilan keputusan dalam menjalankan program organisasi, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan evaluasi.

“Menurut George M. Scolt, sistem informasi dapat dipergunakan secara nyata untuk mengendalikan operasi. Strategi dan perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka pendek, pengendalian manajemen dan pemecahan masalah khusus.”⁸ Batasan mengungkap peran sistem informasi dalam menentukan langkah-langkah organisasi. Pemecahan masalah yang senantiasa melingkupi sebuah organisasi, tidak menutupi kemungkinan mendapat acuan solusi dari adanya system informasi manajemen.

Berbagai sektor pemerintah tanpa ragu memanfaatkan konsep sistem informasi manajemen dalam organisasi, karena memang

⁸George M. Scolt, *Prinsip-prinsip Sistem Informasi Manajemen, terjemahan* (Jakarta, 2004) hal.72

sistem ini menawarkan solusi dari kesalahan mereka. Sistem informasi manajemen mampu menyimpan data secara aman, memproses secara tetap dan menghasilkan informasi secara akurat. “Dengan bantuan sistem komputer, paket-paket program tersebut mempunyai keunggulan dalam hal menyimpan data dalam jumlah yang sangat besar, mengolah data, juga mampu dengan cepat mengeluarkan kembali sebagian atau seluruh data jika diperlukan.”⁹

Para manajer akan terbantu untuk memproses dan menganalisa dengan ketepatan pola kerja dan sistem komputer. Fungsi-fungsi yang ada memang lebih melihat pada peran sistem informasi manajemen untuk mendampingi para manajer dalam menjalankan roda organisasi. Kesalahan fatal yang sering dialami para manajer dalam memimpin organisasi karena mereka tidak mampu menerima informasi secara baik untuk mengambil satu keputusan penting.

c. Perangkat pokok dalam sistem informasi

Berikut ini beberapa perangkat dasar yang diperlukan dalam sistem informasi melalui komputer:

- 1) Manusia, setiap sistem informasi manajemen yang berbasis komputer harus memperhatikan unsur manusia supaya sistem yang diciptakan bermanfaat. Hendaknya diingat bahwa manusia

⁹Apwit M. Yusuf, *Pedoman Praktis Mencari Informasi* (Bandung PT. Remaja Rosdakarya, 1995) hal.118

merupakan penentu dari keberhasilan suatu sistem informasi manajemen dan manusia lah yang akan memanfaatkan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi manajemen. Unsur manusia dalam hal ini adalah para staf komputer profesional dan para pemakai (*computer users*).

- 2) Perangkat keras (*hardware*), istilah perangkat keras menuju kepada perkakas mesin. Karena itu perangkat keras terdiri dari komputer itu sendiri yang terkadang disebut sebagai *Central Processing Unit (CPU)*, beserta semua perangkat pendukungnya. Perangkat pendukung yang dimaksud adalah perkakas keluaran (*out put devices*), perkakas menyimpan (*memory*) dan perkakas komunikasi.
- 3) Perangkat lunak (*software*), istilah perangkat lunak merujuk kepada program-program komputer beserta petunjuk-petunjuk (*manual*) pendukungnya. Yang disebut program komputer adalah instruksi-instruksi yang dapat dibaca oleh mesin yang memerintahkan bagian-bagian dari perangkat keras sistem informasi manajemen berbasis komputer, untuk berfungsi sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat dari data yang tersedia. Program komputer biasanya disimpan di dalam medium input atau output misalnya flash disk atau compact disk untuk selanjutnya dipakai oleh komputer dalam fungsi pengolahannya.

- 4) Data-data, adalah “fakta-fakta, angka-angka, statistik-statistik, dan sebagainya yang dari padanya dapat ditarik kesimpulan.”¹⁰ Data inilah yang akan dipilahkan, dimodifikasi, atau diperbaharui oleh program-program supaya dapat menjadi informasi tersebut. Sebagaimana halnya program-program komputer, data biasanya disimpan dalam bentuk yang dapat dibaca oleh mesin sehingga saat mesin komputer dapat mengolahnya.
- 5) Prosedur, adalah peraturan-peraturan yang menentukan operasi sistem komputer. Misalnya saja peraturan bahwa setiap permintaan belanja barang disuatu instansi harus tercatat di dalam basis data komputer, atau peraturan bahwa setiap akses operator komputer kepada pengolah induk harus dilaporkan waktu dan otoritasnya.¹¹

d. Sistem informasi manajemen dalam struktur organisasi

Dalam manajemen organisasi pada saat ini, sudah sepatutnya sistem informasi manajemen menempati satu posisi yang strategis. Sistem informasi perlu diposisikan sebagai saraf organisasi, dan berorientasi secara parsial pada satu bidang. Sistem informasi manajemen menjiwai segenap komponen dalam organisasi. Menurut Martino:

¹⁰ Moekijat, *Pengantar Sistem Informasi Manajemen* (Bandung:PT. Rosda Karya, 1996) hal.11

¹¹ Wahyudi Kumorotomo dan Subando Agus Margono "Sistem Informasi Manajemen" (Yogyakarta: UGM, 1996) hal. 18-19

Fungsi pengolahan data adalah bersifat inter-departemental. Oleh karena itu bagian sistem informasi manajemen harus terpisah secara organisatoris dari suatu bagian lain. Selanjutnya manajer sistem informasi manajemen haruslah bertanggung jawab kepada pimpinan senior perusahaan yang tidak dibawah satu bagian-bagian tertentu, tetapi berkepentingan dengan efisiensi keseluruhan dari perusahaan. Metode inilah yang telah dijalankan oleh perusahaan yang telah sukses melaksanakan sistem informasi manajemen untuk mengatasi masalah-masalah organisasi.”¹²

Masih banyak organisasi yang belum mengetahui bisa menempatkan posisi sistem informasi manajemen dalam organisasi. Sering muncul kesalahpahaman, seperti sistem informasi manajemen dipandang sebagai mesin kontrol kebijakan atau program organisasi. Sehingga dengan demikian, sistem informasi manajemen bukan menunjang tugas manajer melainkan menghambat.

Dalam struktur organisasi, sistem informasi manajemen bebas dari unsur politik yang sering kali terjadi antar bagian dalam perusahaan atau organisasi. Sistem informasi manajemen menempati posisi independen sebagai bagian utuh dalam organisasi. Ia menjadi bagian keseluruhan tubuh organisasi, bahkan bisa dikatakan jiwa organisasi.

Penggunaan sistem informasi manajemen bagi manajer adalah dengan menyelesaikan berbagai sumber informasi melalui jaringan komputer yang telah diakses pada tiap bagian. Top manajer akan

¹² R. I. Martino, *Manajemen Informasi: Pengantar Komputer* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993) hal. 62

memilih informasi yang masuk dengan menyesuaikan pada masalah yang akan diselesaikan. Tidak semua informasi menjadi satu beban rujukan penyelesaian, melainkan berdasarkan kriteria tertentu.

e. Komputer sebagai perangkat sistem informasi manajemen

Anggapan umum yang sering muncul adalah bahwa sistem informasi manajemen selalu identik dengan pemanfaatan jaringan komputer. Padahal dalam realitas tidak mesti demikian. Sebelum adanya komputer, organisasi sejak dulu telah mengenal sistem informasi, hanya saja masih menggunakan tenaga manusia.

Ketika perkembangan teknologi berkembang sedemikian pesat, dengan satu produknya yaitu komputer, maka sistem informasi telah banyak memanfaatkan komputer sebagai alat bantu. Komputer dapat dengan mudah masuk pada sistem informasi bagi manajer organisasi, sebab komputer memiliki kemampuan yang lebih cepat, cermat dan tepat bila dibanding dengan manusia. Sorjono Trimo berpendapat:

Penalaran yang ada dibalik pengorganisasian itu terutama adalah penekanannya pada aspek efektifitas, efisien, dan produktivitas kerja suatu unit kerja yang harus maksimal bagi pencapaian tujuan organisasi dimana tempat unit kerja itu berada. Khususnya dalam hal ini sistem informasi yang menunjang secara efisien semua keputusan yang diambil oleh para manajer dalam organisasi yang bersangkutan.¹³

¹³ Sorjono, Trimo, *Dari Dokumentasi ke Sistem Informasi Manajemen* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1987) hal. 40

Sementara komputer memang memberikan jawaban atas kebutuhan efektifitas dan efisiensi itu, sehingga keberadaan sistem informasi manajemen yang diidentikkan dengan perangkat komputer menjadi wajar. Pada dasarnya keberadaan komputer tidak dari sebuah alat bantu bagi manajemen. Dengan kecepatan yang di miliki komputer, maka diperlukan satu sistem penge lolaan yang matang. Efektifitas nilai guna komputer tergantung sejauhmana seseorang dapat mengoperasikannya dengan segenap kemampuan berdasarkan kebutuhan organisasi.

Dengan berbagai kelebihan yang di miliki, sehingga saat ini komputer menjadi perangkat mutlak yang harus dimiliki oleh organisasi jika ingin menerapkan sistem informasi manajemen, karena ia sebagai pusat peredaran informasi bagi para penentu kebijakan di organisasi. Para ahli (*system analyst*) merupakan bagian yang akan mengoperasikan kinerja komputer, termasuk pemasangan instalasi komputer untuk melengkapi fasilitas unit dokumentasi. Ini berbeda dengan kerja dokumentasi yang bertugas mengolah perangkat lunak informasi, yang selanjutnya akan diolah dalam sistem komputer.

Dari sini dapat dipahami bahwa sistem komputer memang menjadi bagian yang sangat menentukan berhasil tidaknya penerapan sistem informasi manajemen. Sebab data yang telah disaring akan diolah sepenuhnya oleh komputer, dan diterima

langsung oleh manajer. Di sana kepercayaan sepenuhnya seringkali diberikan pada kerja komputer.

2. Pengelolaan zakat

a. Landasan pengelolaan zakat

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka yang dimaksud “Pengelolaan Zakat” adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Sebelum mendiskusikan tentang pengelolaan zakat maka yang perlu pertama kali di dibicarakan adalah menentukan visi dan misi dari lembaga zakat yang akan dibentuk. Visi lembaga zakat yang akan dibentuk serta misi apa yang hendak dijalankan guna menggapai visi yang telah ditetapkan, akan sangat mewarnai gerak dan arah yang hendak dituju dari pembentukan lembaga zakat tersebut.

Visi dan misi ini harus disosialisasikan kepada segenap pengurus agar menjadi pedoman dan arah dari setiap kebijakan atau keputusan yang diambil. Sehingga lembaga zakat yang dibentuk memiliki arah dan sasaran yang jelas. Dan zakat bukan sekedar kemurahan individu, melainkan “suatu sistem tata sosial yang dikelola oleh Negara melalui aparat tersendiri. Aparat ini mengatur

semua permasalahannya, mulai dari pengumpulan dari para wajib zakat dan pendistribusiannya kepada mereka yang berhak.”¹⁴

Memandang Zakat sebagai masalah atau sebagai urusan pribadi jelas bertentangan dengan fakta-fakta sejarah, yang menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di negara-negara Islam sejak zaman Nabi, Khulafaur Rosyidin dan pemerintahan Islam sesudahnya. Semua ditangani oleh aparat pemerintahan, yang disebut amil zakat, yang bertugas menarik atau mengumpulkan zakat dari para wajib zakat, dan kemudian membagikannya kepada yang berhak menerimanya, seperti yang dilakukan Mu’adz di negeri Yaman atas perintah Nabi Muhammad Saw, untuk menerima zakat dan membagikannya kepada Mustahiqqin.¹⁵

Dan tidak ada keterangan yang menghendaki diwajibkannya pembagian tiap-tiap zakat itu kepada semua golongan, begitupun takdapat diambil sebagai alasan hadits Nabi Saw yang menyuruh Mu’adz agar mengambil zakat dari orang-orang kaya diantara penduduk Yaman dalam menyerahkan kepada orang-orang miskin diantara mereka. Karena itu, merupakan zakat dari jama’ah atau kelompok muslimin dan ternyata diberikan hanyalah pada salah satu jenis dari golongan yang delapan.¹⁶

¹⁴ Yusuf Qardhawi, “*Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*” (Jakarta: Bina Islam Press, 1995) hal.106

¹⁵ Masjfuk Zuhdi H, *Masail Fiqiyah*(Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo, 1997) hal. 250

¹⁶ Sayyid Subiq, “*Fiqih Sunnah, Juz 3*” (Al ma’arif: 1990) hal.105

Intinya penyaluran zakat diprioritaskan kepada mustahiq yang paling berhak dan membutuhkan diantara golongan delapan. Disamping amil zakat, ada lagi sebuah lembaga yang mempunyai tugas yang sama dengan amil zakat, ialah Baitul Maal. Pengelolaan zakat di zaman modern ini menangani orang-orang beriman, berakhlak mulia, berpengetahuan luas dan keterampilan manajemen yang rapi agar dapat menimbulkan kewibawaan pengurus dan kepercayaan masyarakat. Jalan yang dapat ditempuh ada dua cara yaitu “pertama, menyantuni mereka dengan memberikan dana (zakat) yang sifatnya konsumtif atau dengan cara kedua, yaitu memberikan modal yang sifatnya produktif untuk diolah dan dikembangkan.”¹⁷

“Khalifah Umar bin Khattab selalu memberikan kepada fakir miskin bantuan keuangan dari zakat yang bukan sekedar untuk mengisi perutnya berupa sedikit uang atau makanan, melainkan sejumlah modal berupa ternak unta dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.”¹⁸ Sistem zakat yang diperaktekkan (Mu’adz bin Jabal, gubernur Yaman semenjak pemerintahan Rasulullah sampai Kholifah Umar bin Khattab) di Yaman, tak lepas dari misi utama zakat, yakni mengentaskan kemiskinan umat. Semua penduduknya diajak untuk bekerja keras,

¹⁷ M. Hasan Ali “*Masail Fiqiyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*” 1997 hal. 23

¹⁸ Masjfuk Zuhdi H, *Masail Fiqiyah* (Jakarta : PT. Midas Surya Grafindo, 1997) hal. 240

agar semuanya bisa hidup mandiri dengan jarak kehidupan yang berkecukupan.

Dari hasil kerja kerasnya itu, ada sebagian yang penghasilannya melimpah hingga memenuhi nisab zakat. Dan semua yang penghasilannya memenuhi nisab, dipungutlah zakatnya secara tuntas, tak ada yang tinggal seorang pun. Harta zakat yang berhasil dihimpun, kemudian dibagi-bagikan kepada mereka yang masih berhak menerimanya, pembagian ini tidak semata-mata dibagikan begitu saja, tetapi disertai dengan nasehat- nasehat dan saran-saran yang berguna bagi pembangunan ekonomi mereka. Sehingga mereka ini tidak selamanya menjadi penerima zakat, tetapi setahap demi setahap taraf hidupnya meningkat dan suatu saat nanti, dari golongan ini pun akhirnya bisa mengeluarkan zakatnya karena penghasilannya telah membaik dan memenuhi nisab.¹⁹

Di bidang ekonomi, Umar bin Abdul Aziz (seorang Khalifah Daulah Mu'awiyah) mengatur pemasukan kas negara dari pungutan zakat dan infaq, yang kemudian digunakan untuk membiayai pada pemerintahan serta untuk mencukupi kebutuhan hidup para fakir miskin. Lembaga ini sebenarnya merupakan warisan dari kakek beliau Umar bin Khattab yang terkenal dengan "Baitul Maal". Lahan

¹⁹ M. Nipin Abdullah Halim, "Mengapa zakat disyariatkan" (Bandung Pustaka 2001) hal. 40

perekonomian rakyat dibina dan dikembangkan melalui penyuluhan-penyuluhan dan pemberian modal kerja dari Baitul Maal.

Semua lahan yang memungkinkan bisa dikembangkan dan bernilai tinggi, diupayakan pengembangannya sedemikian rupa, sehingga kehidupan seluruh rakyatnya benar-benar bisa menikmati sebuah kehidupan yang makmur berkeadilan dan adil berkemakmuran dibawah lindungan dan ridha Allah SWT.

Dalam surat balasannya (Umar bin Abdul Aziz) yang terakhir kepada gubernur Irak, Abdul Hamid bin Abdurrahman , beliau menulis, “Carilah orang yang bisa membayar upeti atau pajak hasil bumi. Kalau ada kekurangan modal berilah pinjaman kepada mereka agar ia mampu mengolah tanahnya, kita tidak menuntut pengembaliannya kecuali setelah dua tahun atau lebih.”²⁰

b. Visi sosial zakat

Di dalam al-Qur`an ada dua perintah yang disebutkan secara bersamaan dalam 82 ayat, yaitu shalat dan zakat. Dua perintah ini, dalam banyak ayat al-Qur`an telah menunjukkan diri sebagai sentra dari seluruh jalan ke-Islam-an itu sendiri. Dalam hadits, kedua perintah itu diletakkan sebagai rukun Islam segera setelah pengakuan terhadap eksistensi ke-Esaan Tuhan (syahadat), dan dalam urutan

²⁰ Yusuf Qardhawi, “*Konsepsi Islam Dalam Mengentas kemiskinan*” (Surabaya: Bina Ilmu,1996) cet.14, h.185

yang mendahului puasa dan haji. Dalam analisis Mas'udi, perintah shalat dimaksudkan untuk meneguhkan ke-Islam-an (kepasrahan) pada Tuhan yang bersifat personal. Sementara perintah zakat dimaksudkan untuk mengaktualisasikan ke-Islam-an yang bersifat sosial.

Dari paradigma ini, kita dapat mengembangkannya secara lebih jauh bahwa Islam ternyata benar-benar ingin memperjuangkan terwujudnya kesejahteraan sosial yang di dalamnya zakat merupakan salah satu sarannya. Abd Karim al-Tawati dalam Mafhum al-Zakat mengatakan bahwa zakat adalah suatu kerangka teoritis untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Dalam konsep zakat tampak sekali adanya pemihakan kelas sosial kepada golongan yang lemah dan terpinggir.

Secara vokal al-Qur`an menyerukan agar kekayaan tidak boleh hanya berputar terbatas di kalangan kelas kaya saja, sebagaimana dinyatakan dalam (QS, Al Hasyr:7).

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ
 مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya "Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-

*kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.*²¹

Islam melarang orang-orang yang menumpuk-numpuk harta, sebagaimana dinyatakan dalam (QS, Al Humazah: 1-4).

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿١﴾ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ﴿٢﴾ يُحَسِّبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ﴿٣﴾ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ﴿٤﴾

*Artinya: "Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya, sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah."*²²

Tegasnya, Islam mengancam monopoli dan oligopoli dalam sistem ekonomi. Islam menghendaki adanya distribusi yang adil menyangkut kekayaan. Dengan visi sosial seperti inilah kehadiran zakat dapat dipahami. Zakat datang bukan agar semua orang memiliki bagian secara sama rata, baik sedikitnya maupun banyaknya, melainkan untuk mencegah terjadinya ketimpangan, di mana sebagian membubung ke atas dengan kekayaan yang dikuasainya, sementara sebagian yang lain justru tersungkur ke bawah dengan kemelaratan yang dideritanya.

²¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta : Bumi Restu, 1976) hal

²² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta : Bumi Restu, 1976) hal

Bermula dari ketimpangan dalam hal ekonomi inilah, ketimpangan di bidang yang lain (politik dan budaya) kemudian mengikuti. Pada waktu kekayaan menembus batas teratas, sehingga menyebabkan kesenjangan kelas, saat itulah golongan yang memonopoli dan mengkonsentrasikan kekayaan itu menjadi musuh-musuh Islam. Al-Qur`an menyerukan agar kita menjadi pembela kelas yang tertindas dan golongan yang lemah. (QS, An Nissa' : 75).

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ
وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ
أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

Artinya: "Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!"²³

c. Tahapan pengelolaan zakat

Memandang Zakat sebagai masalah atau sebagai urusan pribadi jelas bertentangan dengan fakta-fakta sejarah, yang menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di negara-negara Islam sejak zaman Nabi, al-Khulafaur Rosyidin dan pemerintahan Islam sesudahnya. Semua

²³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Bumi Restu, 1976) hal

ditangani oleh aparat pemerintahan, yang disebut amil zakat, yang bertugas menarik atau mengumpulkan zakat dari para wajib zakat, dan kemudian membagikannya kepada yang berhak menerimanya, seperti yang dilakukan Mu'adz di negeri Yaman atas perintah Nabi Muhammad Saw, untuk menerima zakat dan membagikannya kepada Mustahiqqin.²⁴

Dan tidak ada keterangan yang menghendaki diwajibkannya pembagian tiap-tiap zakat itu kepada semua golongan, begitupun takdapat diambil sebagai alasan hadits Nabi Saw yang menyuruh Mu'adz agar mengambil zakat dari orang-orang kaya diantara penduduk Yaman dalam menyerahkan kepada orang-orang miskin diantara mereka. Karena itu, merupakan zakat dari jama'ah atau kelompok muslimin dan ternyata diberikan hanyalah pada salah satu jenis dari golongan yang delapan.²⁵

Intinya penyaluran zakat diprioritaskan kepada mustahiq yang paling berhak dan membutuhkan diantara golongan delapan. Disamping amil zakat, ada lagi sebuah lembaga yang mempunyai tugas yang sama dengan amil zakat, ialah Baitul Maal. Pengelolaan zakat di zaman modern ini menangani orang-orang beriman, berakhlak mulia, berpengetahuan luas dan keterampilan manajemen yang rapi agar dapat menimbulkan kewibawaan pengurus dan

²⁴ Masjfuk Zuhdi H, *Masail Fiqiyah* (Jakarta : PT. Midas Surya Grafindo, 1997) hal. 250

²⁵ Sayyid Sabiq, "*Fiqih Sunnah, Juz 3*" (Bandung: Al-ma'arif, 1990) hal. 105

kepercayaan masyarakat. Jalan yang dapat ditempuh ada dua cara yaitu pertama, menyantuni mereka dengan memberikan dana (zakat) yang sifatnya konsumtif atau dengan cara kedua, yaitu memberikan modal yang sifatnya produktif untuk diolah dan dikembangkan.²⁶

Sistem zakat yang diperaktekkan (Mu'adz bin Jabal, gubernur Yaman semenjak pemerintahan Rasulullah sampai Kholifah Umar bin Khattab) di Yaman, tak lepas dari misi utama zakat, yakni mengentaskan kemiskinan umat. Semua penduduknya diajak untuk bekerja keras, agar semuanya bisa hidup mandiri dengan jarak kehidupan yang berkecukupan. Dari hasil kerja kerasnya itu, pastilah ada sebagian yang penghasilannya melimpah hingga memenuhi nisab zakat. Dan semua yang penghasilannya memenuhi nisab, dipungutlah zakatnya secara tuntas, tak ada yang tinggal seorang pun. Harta zakat yang berhasil dihimpun, kemudian dibagi-bagikan kepada mereka yang masih berhak menerimanya, pembagian ini tidak semata-mata dibagikan begitu saja, tetapi disertai dengan nasehat- nasehat dan saran-saran yang berguna bagi pembangunan ekonomi mereka. Sehingga mereka ini tidak selamanya menjadi penerima zakat, tetapi setahap demi setahap taraf hidupnya meningkat dan suatu saat nanti, dari golongan ini pun akhirnya bisa mengeluarkan zakatnya karena penghasilannya telah membaik dan memenuhi nisab.²⁷

²⁶ M. Hasan Ali, *Masail Fiqiyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Bumi Restu, 1997) hal. 23

²⁷ M. Nipan Abdullah Halim, *Mengapa Zakat Disyariatkan* (Bandung Pustaka2001) hal. 40

Dalam tataran ini, Nabi juga mengatakan bahwa zakat merupakan kewajiban yang tak dapat ditawar, atas orang yang telah memiliki kemampuan tertentu. Garaudy mengatakan bahwa zakat itu bukanlah suatu sumbangan, tetapi suatu bentuk keadilan internal yang terlembaga, sesuatu yang diwajibkan, sehingga dengan rasa solidaritas yang bersumber dari keimanan itu orang dapat menaklukkan egoisme dan kerakusan dirinya, yang pada gilirannya dapat terbentuk formasi sosial yang berkeadilan.

Dengan argumen di atas, dalam pengelolaan zakat, kita tidak bisa hanya mengandalkan analisis normatif, melainkan juga harus berpijak pada landasan realitas empiris. Sehingga ada beberapa strategi pengelolaan zakat yang harus dilakukan, *pertama*, sudah saatnya kita melakukan sensus zakat yang dapat mendeteksi para pembayar zakat (muzakki) hingga ke pelosok pedesaan. Dan lewat sensus ini pula kita dapat mengetahui mereka yang berhak menerima zakat (mustahiq al-zakat).

Kedua, wilayah zakat perlu dibagi-bagi atas dasar perbedaan tingkat kemakmuran, untuk distandarkan berapa margin kewajiban zakat pada masing-masing daerah. Masing-masing daerah umumnya sudah memiliki data dasarnya, berupa Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), data mengenai penghasilan rata-rata daerah, tingkat ketimpangan pendapatan daerah dan sebagainya. Untuk ini harus dilakukan perhitungan, kemudian hasil perhitungan itu dijadikan

acuan oleh panitia zakat, sehingga distribusi zakat menjadi tepat sasaran, tidak sekedar membagi-bagi tanpa memperhatikan fungsional dan tidaknya zakat buat pemberdayaan ekonomi rakyat pada level bawah.

Ketiga, perlu untuk membentuk lembaga zakat lintas SARA yang keberadaannya dikukuhkan oleh UU zakat. Secara lebih jauh, lembaga zakat yang memiliki kewenangan formal ini, bukan saja dapat menekan pihak yang enggan membayar zakat, melainkan juga dalam hal pentasarufan (pendayagunaan)-nya pun dapat difungsikan secara nyata sebagai upaya membangun tata kehidupan sosial yang lebih adil buat semuanya.

Keempat, perlunya merelatifkan besaran tarif atau kadar zakat yang harus dikeluarkan. Apabila ada variabel tantangan keadilan dan kemaslahatan ditemukan lebih berat pada masyarakat tertentu, maka tidak ada halangan untuk menaikkan dan begitu juga sebaliknya untuk menurunkan-tarif yang telah ditentukan Nabi Muhammad, yakni antara 2,5 % dan 10 %.

Dan yang membedakan pajak dengan zakat terletak pada dasar hukumnya, status hukumnya, obyek sasarannya, kriteria kewajibannya, pos-pos penggunaannya, serta pada hikmahnya.

B. Kajian Teoritik

Sistem informasi dapat merupakan kombinasi teratur apapun dari orang-orang, *hardware*, *software*, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Orang bergantung pada sistem informasi untuk berkomunikasi antara satu sama lain dengan menggunakan berbagai jenis perangkat keras (*hardware*), perintah dan prosedur pemrosesan informasi (*software*), saluran komunikasi (jaringan), dan data yang disimpan (sumber daya data) sejak permulaan peradaban.

Aktivitas pemrosesan informasi dasar (atau pemrosesan data) yang terjadi antara lain:

1) Input Data

Data mengenai transaksi dan kegiatan lainnya harus ditangkap dan disiapkan untuk pemrosesan untuk aktivitas input. Input biasanya berbentuk aktivitas *entri data* seperti pencatatan dan pengeditan. Para pemakai akhir biasanya memasukkan data secara langsung ke dalam sistem komputer, atau mencatat data mengenai transaksi dari beberapa jenis media fisik. Hal ini biasanya meliputi berbagai aktivitas edit untuk memastikan bahwa mereka telah mencatat data dengan benar. Begitu dimasukkan, data bisa dipindahkan ke dalam media yang dapat dibaca mesin, seperti *magnetic disk* hingga dibutuhkan untuk pemrosesan.

2) Pemrosesan Data Menjadi Informasi

Data biasanya tergantung pada aktivitas pemrosesan seperti perhitungan, perbandingan, pemilahan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran. Aktivitas-aktivitas ini mengatur, menganalisis, dan memanipulasi data, hingga mengubahnya ke dalam informasi bagi para pemakai akhir. Kualitas data apapun yang disimpan dalam sistem informasi juga harus dipelihara melalui proses terus-menerus dari aktivitas perbaikan dan pembaruan.

3) Output Produk Informasi

Informasi dalam berbagai bentuk dikirim ke pemakai akhir dan disediakan untuk mereka dalam aktivitas output. Tujuan dari sistem informasi adalah untuk menghasilkan produk informasi yang tepat bagi para pemakai akhir. Produk informasi umum meliputi pesan, laporan, formulir, dan gambar grafis yang dapat disediakan melalui tampilan video, respons audio, produk kertas, dan multimedia.

4) Penyimpanan Data

Penyimpanan adalah komponen dasar sistem informasi. Penyimpanan adalah aktivitas sistem informasi tempat data dan informasi disimpan secara teratur untuk digunakan kemudian. Dalam penyimpanan data dan informasi, Yayasan aytim mandiri menggunakan dua kriteria

C. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian pustaka yang telah di jabarkan oleh para peneliti terdahulu mengungkapkan dengan menggunakan patokan dari “The Encyclopedia of management” yang menyebutkan bahwa sistem informasi manajemen adalah pendekatan-pendekatan yang direncanakan dan disusun untuk memberikan bantuan piawai yang memudahkan proses manajerial kepada pejabat pimpinan. Mengenai pokok permasalahan peneliti disini adalah sistem informasi manajemen dalam pengelolaan zakat di Yayasan Yatim Mandiri Cabang Surabaya adalah fokus penelitian merupakan pengembangan pokok permasalahan yang mengambil atau mengacu pada penelitian sebelumnya.

Ada beberapa penelitian yang membahas sistem informasi manajemen, diantaranya yang dilakukan oleh :

1. Hindrayani dengan topik “Sistem Informasi Manajemen dalam Perencanaan pada Yayasan Taman Pendidikan dan Sosial Nahdlatul Ulama Khadijah Surabaya”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2003 yang menghasilkan kesimpulan yayasan taman pendidikan dan sosial Nahdlatul Ulama Khadijah Surabaya telah menerapkan sistem informasi manajemen dalam aktifitas keseharian. Begitu pula dalam perencanaan yayasan Khadijah telah menerapkan fungsi perencanaan tersebut.
2. Manajemen pengelolaan zakat, Infaq dan shadaqah (ZIS) Baitulmal Hidayatullah Surabaya, oleh Hilmi Agus Chandra, Fakultas Dakwah,

2003, yang meliputi tentang sistem manajemen pengelolaan ZIS BMH: perencanaan, administrasi, bagian penarikan dan pendayagunaan serta proses pelaksanaan manajemen pengelolaan ZIS BMH meliputi dari penentuan sumber dana BMH, yang mana juga telah menerapkan sistem informasi manajemen dalam aktifitas keseharian. Begitu pula dalam perencanaan yayasan Khadijah telah menerapkan fungsi perencanaan tersebut.

3. Fungsi koordinasi dalam pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Propinsi Jawa Timur, oleh Didik Wahyudi, Fakultas Dakwah, 2005, yang meliputi fungsi dan faktor-faktor yang mendukung pengkoordinasian pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Propinsi Jawa Timur, yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan koordinasi dalam pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Propinsi Jawa Timur dalam hal ini dengan mengadakan perencanaan program, dan pengelolaan sistem yang efektif dan efisien dengan adanya program atau kegiatan yang tersusun.

Sedangkan dalam skripsi ini, peneliti lebih menekankan pada proses pelaksanaan sistem informasi manajemen, dan faktor-faktor yang mendukung serta menghambat dalam pelaksanaan sistem informasi manajemen di Yayasan Yatim Mandiri Cabang Surabaya, yang merupakan badan yang dikelola oleh lembaga swasta.